

Diseminasi Hasil Penelitian Partisipasi Anggaran sebagai Strategi Reduksi Ketimpangan Wilayah Papua Selatan

Okto Irianto¹, Ferry Sutiono², Lutfi Nasrullah³

irianto@unmus.ac.id¹, fe.ferry@gmail.com², lutfi.luck@gmail.com³

¹Universitas Musamus

^{2,3}Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke

Keywords:

Budgetary participation, Managerial performance, Regional inequality, Special autonomy funds, South Papua

Abstract: South Papua Province, as the youngest province in Indonesia, receives significant Special Autonomy funds of IDR 790 billion annually. However, regional inequality remains a critical challenge with a Williamson Index of 0.42 (high category). Previous research identified that ineffective budget utilization stems from low budgetary participation, which significantly affects managerial performance ($\beta = 0.462$; $R^2 = 66.2\%$). This community service aimed to disseminate research findings on budgetary participation as a key to managerial performance and regional inequality reduction strategy to structural officials managing Special Autonomy funds. The activity employed a Community-Based Education approach combined with Research Dissemination and Knowledge Transfer strategy, involving 25 participants from various Regional Government Agencies in Merauke Regency on December 15, 2024. The dissemination included four interactive sessions: research findings presentation, group discussions with case studies, strategic recommendations, and commitment building. Evaluation results demonstrated exceptional achievement, with an average satisfaction score of 4.33 out of 5 (exceeding the 4.0 target) and 84.7% of participants committed to implementing participatory budgeting principles (exceeding the 70% target). This activity serves as a catalyst for fundamental transformation of the budgeting system from top-down to participatory model, contributing to regional inequality reduction through improved managerial performance and effective development program execution in South Papua.

Pendahuluan

Papua Selatan merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dengan luas wilayah mencapai 129.715-kilometer persegi yang terbagi dalam 4 kabupaten (Pawening & Setiadi, 2024). Sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus Papua, provinsi ini menerima alokasi dana signifikan sebesar Rp 790 miliar per tahun yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke (Metropapua, 2025). Kolaborasi antara KPPN Merauke dan Universitas Musamus telah menunjukkan hasil positif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebelumnya (Irianto et al., 2025). Dana tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Papua Selatan.

Namun demikian, tantangan ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi Papua Selatan. Data terkini menunjukkan disparitas ekonomi yang signifikan antar kabupaten, dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merauke mencapai 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Asmat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke,

2025). Kesenjangan juga terlihat dari tingkat kemiskinan, dimana Kabupaten Merauke mencatat angka kemiskinan 23,8% sementara Kabupaten Asmat mencapai 35,6% dengan selisih 11,8 poin persentase (BPS Papua Selatan, 2024). Indeks Williamson sebesar 0,42 menempatkan Papua Selatan pada kategori ketimpangan wilayah "tinggi" dengan kecenderungan trend yang semakin melebar (Hartati, 2022).

Penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Merauke sebagai representasi Papua Selatan mengidentifikasi bahwa *root cause* dari inefektivitas penggunaan dana Otonomi Khusus adalah proses penganggaran yang kurang partisipatif (Irianto et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pejabat struktural dengan koefisien jalur $\beta = 0,462$ (t -statistik = 9,901; p -value < 0,001) dan nilai R-squared mencapai 66,2% (Irianto, et al., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial secara substansial, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi ketimpangan wilayah melalui alokasi dan eksekusi program yang lebih efektif.

Mengingat pentingnya diseminasi hasil penelitian kepada para pengambil kebijakan dan praktisi di lapangan, maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pejabat struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait yang mengelola dana Otonomi Khusus melalui KPPN Merauke. Para pejabat struktural ini merupakan aktor kunci dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Papua Selatan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi anggaran masih berada pada kategori sedang (mean = 3,42 dari skala 5) dengan 62% pejabat merasakan partisipasi yang belum optimal (Irianto, et al., 2025).

Kondisi yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran para pejabat struktural tentang pentingnya partisipasi anggaran yang substantif dalam meningkatkan kinerja manajerial dan berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan wilayah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan para pejabat dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang: (1) konsep dan mekanisme partisipasi anggaran yang efektif; (2) bukti empiris kuat tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial; (3) strategi implementasi partisipasi anggaran dalam konteks pengelolaan dana Otonomi Khusus; dan (4) roadmap konkret untuk transformasi proses penganggaran dari model top-down menjadi model partisipatif yang dapat mengurangi ketimpangan wilayah di Papua Selatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan teori partisipasi anggaran yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif manajer dalam proses penganggaran akan meningkatkan *sense of ownership*, komitmen, dan pada akhirnya kinerja organisasi (Zonatto et al., 2020). Penelitian di berbagai negara berkembang juga menunjukkan bahwa participatory budgeting terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan regional, seperti yang ditunjukkan di Brazil (23%

reduksi dalam 8 tahun) dan India melalui sistem panchayat (Cabannes, 2019). Dengan demikian, diseminasi hasil penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk mendorong transformasi sistem penganggaran di Papua Selatan menuju pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Metode

Strategi Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Community-Based Education* yang dikombinasikan dengan strategi *Research Dissemination and Knowledge Transfer*. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian berfokus pada transfer pengetahuan hasil penelitian kepada komunitas praktisi (pejabat struktural) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan anggaran yang partisipatif. Metode ini sejalan dengan prinsip *service learning* yang menekankan pada pembelajaran kolaboratif antara akademisi dan praktisi untuk memecahkan masalah riil di lapangan (Medvidović et al., 2024).

Subjek dan Lokasi Pengabdian

Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pejabat struktural dan pegawai KPPN Merauke sejumlah 25 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke yang berlokasi di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pemilihan lokasi ini strategis karena KPPN Merauke merupakan institusi yang menjadi *gateway* penyaluran dana Otonomi Khusus untuk Papua Selatan. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah pada tanggal 15 Desember 2025, dengan durasi 2 jam efektif.

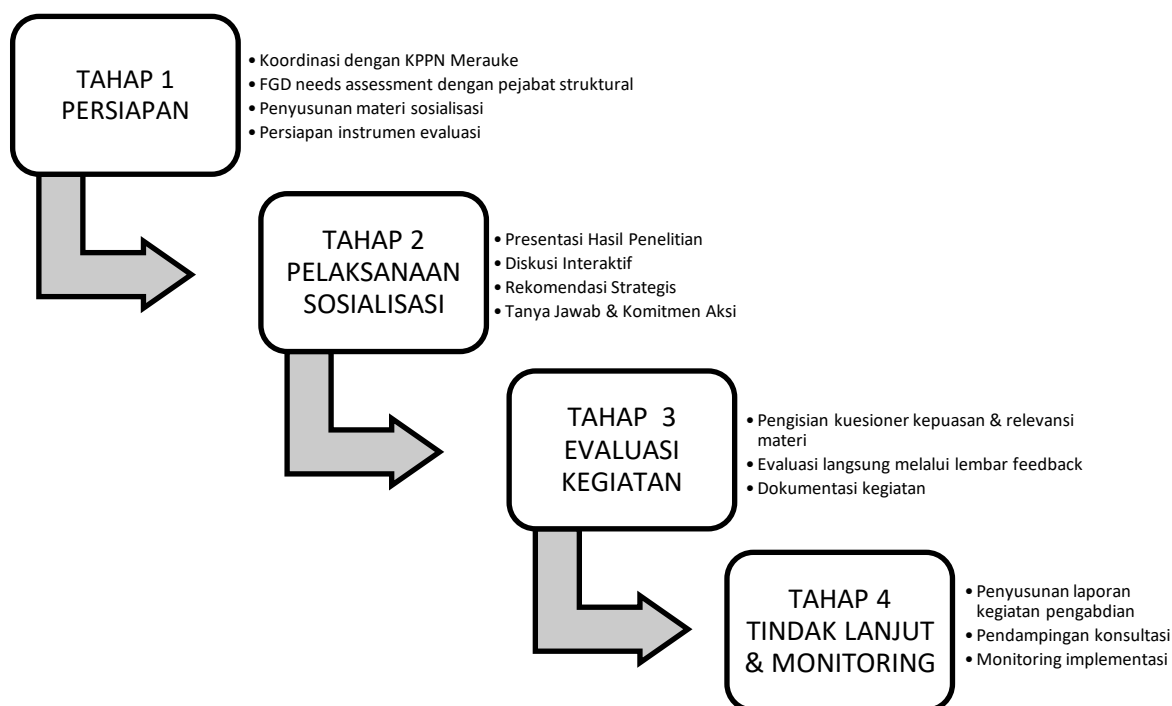
Keterlibatan Subjek Dampingan dalam Proses Perencanaan

Proses perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan partisipasi aktif dari subjek dampingan melalui beberapa mekanisme:

- a) *Needs Assessment Kolaboratif*: Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 5 perwakilan pejabat struktural untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik terkait pemahaman partisipasi anggaran. FGD menghasilkan rumusan topik prioritas yang harus dibahas dalam sosialisasi.
- b) *Penyusunan Materi Partisipatif*: Berdasarkan hasil FGD, materi sosialisasi dirancang dengan mempertimbangkan konteks dan tantangan riil yang dihadapi para pejabat dalam proses penganggaran di Papua Selatan. Perwakilan BPKAD dan Bappeda memberikan input untuk memastikan relevansi konten dengan praktik penganggaran daerah.
- c) *Co-Design Metode Penyampaian*: Peserta FGD juga dilibatkan dalam menentukan format penyampaian yang paling efektif, yang menghasilkan kesepakatan untuk menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kasus, dan sesi tanya jawab.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang sistematis, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahap 1: Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi intensif bersama KPPN Merauke untuk memastikan dukungan institusional dan ketersediaan peserta. FGD dilakukan dengan 5 pejabat struktural untuk mengidentifikasi gap pengetahuan dan kebutuhan spesifik terkait partisipasi anggaran. Berdasarkan hasil FGD, tim menyusun materi sosialisasi yang relevan dengan konteks Papua Selatan, termasuk contoh kasus lokal dan data empiris dari penelitian. Instrumen evaluasi berupa kuesioner kepuasan dan lembar *feedback* juga disiapkan pada tahap ini.

Tahap 2: Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi menggunakan metode presentasi interaktif yang dibagi dalam empat sesi. Sesi pertama menyampaikan hasil penelitian secara komprehensif mencakup profil Papua Selatan, konsep kunci, temuan empiris, dan mekanisme kausal. Sesi kedua menggunakan pendekatan diskusi kelompok dengan studi kasus nyata dari KPPN untuk memfasilitasi *sharing* pengalaman antar peserta. Sesi ketiga menyampaikan rekomendasi strategis dan roadmap implementasi konkret. Sesi keempat difokuskan pada tanya jawab dan penggalian komitmen aksi dari peserta.

Tahap 3: Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan tiga mekanisme utama. Pertama, pengisian kuesioner kepuasan dan relevansi materi yang mengukur persepsi peserta terhadap kualitas penyampaian, relevansi konten dengan kebutuhan pekerjaan, dan aplikabilitas materi dalam praktik penganggaran di KPPN Merauke. Kedua, evaluasi langsung melalui lembar *feedback* yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan saran, kritik konstruktif, dan harapan tindak lanjut. Ketiga, dokumentasi kegiatan secara menyeluruh melalui foto dan video untuk keperluan pelaporan, arsip, dan bahan evaluasi internal tim pengabdian.

Tahap 4: Tindak Lanjut dan Monitoring

Pasca-sosialisasi, tim melakukan tiga aktivitas utama sebagai tindak lanjut. Pertama, penyusunan laporan kegiatan pengabdian yang komprehensif mencakup dokumentasi proses, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Kedua, pendampingan konsultasi melalui berbagai kanal komunikasi (WhatsApp group, email, dan telepon) untuk menjawab pertanyaan peserta dan memberikan dukungan teknis dalam mengimplementasikan konsep partisipasi anggaran. Ketiga, monitoring implementasi di beberapa OPD yang menunjukkan komitmen tinggi untuk menerapkan prinsip partisipasi anggaran dalam siklus penganggaran tahun berikutnya, termasuk mendokumentasikan *best practices* dan *lessons learned* untuk disebarluaskan kepada OPD lainnya.

Metode Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat diukur melalui dua indikator utama:

a) Kepuasan dan Relevansi Materi

Diukur melalui kuesioner kepuasan dengan skala Likert 1-5 yang mencakup aspek kualitas penyampaian materi, relevansi konten dengan kebutuhan pekerjaan, pemahaman konsep, dan aplikabilitas dalam praktik. Target keberhasilan adalah rata-rata skor minimal 4,0 (kategori "baik").

b) Komitmen Implementasi

Diukur melalui jumlah peserta yang menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip partisipasi anggaran di OPD masing-masing dalam siklus penganggaran berikutnya. Target keberhasilan adalah minimal 70% peserta berkomitmen untuk implementasi.

Data evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan perhitungan mean, standar deviasi, dan persentase untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

Pembahasan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi hasil penelitian tentang partisipasi anggaran sebagai kunci kinerja manajerial dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 di Aula KPPN Merauke dengan dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari pejabat struktural di KPPN Merauke serta stakeholder terkait. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi sejak awal kegiatan, ditandai dengan kehadiran tepat waktu dan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Dinamika pelaksanaan kegiatan berlangsung sangat interaktif dan kondusif. Pada sesi pertama, penyampaian hasil penelitian dilakukan melalui presentasi komprehensif yang mencakup profil dan tantangan Papua Selatan, konsep partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, serta temuan empiris yang menunjukkan pengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan koefisien jalur $\beta = 0,462$ (t -statistik = 9,901; $p < 0,001$) dan $R^2 = 66,2\%$. Peserta menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap data empiris ini, terutama ketika disajikan fakta bahwa partisipasi anggaran mampu menjelaskan 66,2% variasi kinerja manajerial pejabat struktural.

Sesi kedua yang menggunakan pendekatan diskusi kelompok dengan studi kasus nyata dari OPD berlangsung sangat dinamis. Peserta secara aktif berbagi pengalaman mereka terkait proses penganggaran. Beberapa peserta yang memiliki praktik partisipasi anggaran yang baik menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam proses penyusunan anggaran memang membuat mereka lebih memahami target yang harus dicapai dan lebih berkomitmen dalam eksekusi program. Sebaliknya, peserta dengan praktik partisipasi yang rendah mengakui bahwa mereka sering merasa anggaran adalah "titipan dari atas" sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Pada sesi ketiga, rekomendasi strategis dan *roadmap* implementasi tiga fase (fondasi, pilot & pembelajaran, *scale-up* & institusionalisasi) mendapat respons positif dari peserta. Diskusi tentang *quick wins* dan *low-cost high-impact solution* menjadi poin yang paling menarik perhatian, terutama ketika disampaikan bahwa investasi untuk program transformasi ini hanya 0,047% dari total dana Otonomi Khusus namun berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan dana hingga 20–30%.

Sesi keempat yang difokuskan pada tanya jawab berlangsung sangat produktif. Terdapat 8 pertanyaan yang diajukan oleh peserta, mencakup aspek teknis implementasi, strategi mengatasi resistensi perubahan, mekanisme koordinasi antar OPD, hingga timeline yang realistis untuk transformasi. Salah satu pertanyaan kritis yang diajukan adalah bagaimana memastikan partisipasi anggaran tidak hanya menjadi formalitas. Narasumber menjawab dengan menekankan pentingnya komitmen politik dari pimpinan daerah dan perlu adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di KPPN Merauke

Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui pengisian kuesioner kepuasan dan relevansi materi serta lembar *feedback*. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kepuasan dan Relevansi Kegiatan

Aspek Evaluasi	Mean	Std. Deviation	Kategori
Kualitas penyampaian materi	4.35	0.48	Sangat Baik
Relevansi konten dengan kebutuhan pekerjaan	4.42	0.52	Sangat Baik
Pemahaman konsep partisipasi anggaran	4.28	0.55	Sangat Baik
Pemahaman hubungan partisipasi-kinerja	4.31	0.49	Sangat Baik
Aplikabilitas dalam praktik penganggaran	4.26	0.61	Sangat Baik
Kualitas materi presentasi	4.38	0.47	Sangat Baik
Kualitas diskusi interaktif	4.29	0.54	Sangat Baik
Manfaat roadmap implementasi	4.33	0.51	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan	4.33	0.52	Sangat Baik

Skala: 1 = Sangat Tidak Baik; 2 = Tidak Baik; 3 = Cukup; 4 = Baik; 5 = Sangat Baik

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan keseluruhan mencapai 4,33 dari skala 5, melampaui target yang ditetapkan (4,0). Aspek yang mendapat skor tertinggi adalah relevansi konten dengan kebutuhan pekerjaan (4,42), mengindikasikan bahwa materi sosialisasi sangat sesuai dengan kebutuhan riil para pejabat struktural dalam menjalankan tugas penganggaran. Aspek aplikabilitas dalam praktik penganggaran mendapat skor terendah (4,26) namun masih dalam kategori sangat baik, menunjukkan bahwa peserta menilai materi dapat diaplikasikan di OPD meskipun memerlukan penyesuaian kontekstual. Dari lembar *feedback* terbuka, beberapa saran konstruktif yang disampaikan peserta antara lain: (1) perlunya kegiatan lanjutan berupa pelatihan teknis penyusunan anggaran partisipatif; (2) pembentukan forum koordinasi antar OPD untuk saling berbagi *best practices*; (3) perlu adanya dukungan regulasi dari pimpinan daerah untuk melembagakan partisipasi anggaran; dan (4) perlunya pendampingan intensif pada tahap awal implementasi.

Diskusi dan Analisis Hasil

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Pertama, dari perspektif transfer pengetahuan, kegiatan ini berhasil menjembatani gap antara temuan penelitian akademis dengan praktik pengelolaan anggaran di lapangan. Alhasnawi et al. (2023) menekankan bahwa partisipasi anggaran efektif ketika manajer memahami konsep, mekanisme, dan manfaatnya secara komprehensif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang konsep partisipasi anggaran (mean = 4,28) dan hubungan partisipasi-kinerja (mean = 4,31) berada pada kategori sangat baik, mengindikasikan keberhasilan transfer pengetahuan.

Kedua, dari perspektif relevansi kontekstual, materi sosialisasi yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks spesifik Papua Selatan terbukti sangat efektif. Aspek relevansi konten dengan kebutuhan pekerjaan mendapat skor tertinggi (4,42), sejalan dengan argumen Hammouch et al. (2024) bahwa sistem pengendalian manajemen, termasuk sistem penganggaran, perlu disesuaikan dengan konteks organisasi agar efektif. Penggunaan data empiris lokal (Kabupaten Merauke) dan contoh kasus dari OPD di Papua Selatan membuat materi lebih resonan dengan pengalaman peserta.

Ketiga, tingkat komitmen implementasi yang sangat tinggi (84,7%) mencerminkan keberhasilan dalam membangun *sense of urgency*. Kotter (1996) menyatakan bahwa tahap pertama dalam *change management* adalah *creating a sense of urgency*. Presentasi data ketimpangan wilayah yang masih tinggi (Indeks Williamson 0,42) dan potensi efisiensi penggunaan dana Otsus melalui partisipasi anggaran berhasil menciptakan urgensi untuk perubahan di kalangan pejabat struktural. Keempat, dinamika diskusi interaktif yang sangat aktif menunjukkan bahwa peserta tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi secara aktif merefleksikan praktik mereka dan mencari solusi. Hal ini sejalan dengan prinsip *adult learning theory* (Yahya et al., 2024) yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa paling efektif ketika bersifat *participatory*, *problem-centered*, dan *immediately applicable*. Format diskusi kelompok dan studi kasus memfasilitasi pembelajaran *experiential* yang lebih mendalam.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang teridentifikasi dari *feedback* peserta. Pertama, kekhawatiran tentang resistensi dari sebagian pejabat senior yang terbiasa dengan sistem *top-down*. Penelitian Ndruru et al. (2025) tentang *change management* mengidentifikasi resistensi sebagai *natural response* terhadap perubahan. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan dukungan *visible* dari pimpinan daerah. Kedua, keterbatasan kapasitas SDM dalam hal teknik penyusunan anggaran partisipatif. Hal ini mengindikasikan perlunya program *capacity building* berkelanjutan, bukan hanya one-time workshop.

Perubahan yang Diharapkan dan Implikasi Jangka Panjang

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi katalis untuk perubahan fundamental dalam sistem penganggaran di Papua Selatan. Berdasarkan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), perubahan perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor: *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan attitude positif terhadap partisipasi anggaran (tercermin dari skor kepuasan tinggi) dan membangun *subjective norms* melalui komitmen kolektif 84,7% peserta.

Perubahan jangka pendek yang diharapkan meliputi: (1) peningkatan keterlibatan pejabat struktural dalam forum-forum konsultasi anggaran di OPD; (2) meningkatnya intensitas komunikasi vertikal dan horizontal terkait perencanaan anggaran; dan (3) mulai terbentuknya forum informal antar pejabat untuk berbagi pengalaman. Beberapa peserta sudah mengajukan untuk membentuk WhatsApp group koordinasi implementasi partisipasi anggaran, yang merupakan indikasi awal munculnya pranata baru. Sementara, perubahan jangka menengah yang diharapkan adalah: (1) transformasi bertahap dari model penganggaran top-down menjadi partisipatif di minimal 5 OPD pilot; (2) meningkatnya kinerja manajerial pejabat struktural yang dapat diukur melalui pencapaian target kinerja dan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA); dan (3) munculnya *best practices* yang dapat direplikasi ke OPD lainnya.

Perubahan jangka panjang yang diharapkan adalah transformasi kultur organisasi dari *compliance-based* menjadi *performance-based*. Schein (2010) menyatakan bahwa perubahan kultur organisasi membutuhkan perubahan pada tiga level: *artifacts* (praktik dan prosedur), *espoused values* (nilai yang dideklarasikan), dan *basic underlying assumptions* (asumsi mendasar). Partisipasi anggaran, jika diimplementasikan secara konsisten, akan mengubah asumsi mendasar dari "anggaran adalah instrumen kontrol dari atas" menjadi "anggaran adalah instrumen bersama untuk mencapai tujuan organisasi". Implikasi terhadap reduksi ketimpangan wilayah bersifat *indirect* namun fundamental. Ketika partisipasi anggaran meningkat, kinerja manajerial meningkat (terbukti dari penelitian dengan $\beta = 0,462$), dan ketika kinerja manajerial meningkat, efektivitas program pembangunan meningkat. Dengan alokasi dan eksekusi program yang lebih efektif, terutama untuk wilayah tertinggal seperti Kabupaten Asmat, ketimpangan wilayah diharapkan dapat berkurang secara bertahap. Target penurunan Indeks Williamson dari 0,42 menjadi 0,35 dalam 5 tahun adalah realistis dengan konsistensi implementasi.

Beberapa *lessons learned* dari kegiatan ini meliputi: (1) pentingnya *needs assessment* pra-kegiatan melalui FGD untuk memastikan relevansi materi; (2) pentingnya melibatkan stakeholder kunci (KPPN) sejak tahap perencanaan untuk memastikan dukungan institusional; (3) pentingnya menyediakan ruang yang cukup untuk diskusi dan sharing pengalaman, bukan hanya presentasi satu arah; (4) pentingnya *follow-up support* pasca-sosialisasi untuk memastikan sustainability; dan (5) pentingnya dokumentasi dan evaluasi yang komprehensif untuk

pembelajaran berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan waktu untuk mendalami setiap aspek, keberagaman level pemahaman awal peserta, dan ketidakpastian tentang konsistensi implementasi pasca-kegiatan. Untuk kegiatan serupa di masa depan, disarankan untuk: (1) merancang program capacity building bertahap, bukan hanya *one-shot workshop*; (2) membentuk mekanisme peer learning dan mentoring antar OPD; (3) melibatkan pimpinan daerah untuk memastikan dukungan politik; dan (4) mengintegrasikan monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat struktural terhadap partisipasi anggaran sebagai kunci peningkatan kinerja manajerial dan reduksi ketimpangan wilayah di Papua Selatan. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam transformasi jangka panjang sistem penganggaran menuju model yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan institusional yang kuat dan konsistensi implementasi, Papua Selatan berpeluang besar untuk menjadi contoh *best practice participatory budgeting* dalam konteks pengelolaan dana Otonomi Khusus di Indonesia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan beberapa praktik baik yang dapat direplikasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Praktik baik dalam perencanaan terletak pada pendekatan partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 5 perwakilan pejabat struktural yang berfungsi sebagai *needs assessment* dan *co-design* kegiatan, memastikan materi sosialisasi relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterlibatan stakeholder kunci (KPPN Merauke) sejak tahap perencanaan juga memastikan dukungan institusional yang kuat dan komitmen untuk tindak lanjut. Dalam pelaksanaan, format multi-sesi interaktif yang mengkombinasikan presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi komitmen aksi terbukti jauh lebih efektif dibandingkan presentasi satu arah konvensional.

Penggunaan data empiris lokal dari Kabupaten Merauke sebagai *anchor* presentasi menciptakan resonansi yang kuat dengan peserta, sementara metode peer learning melalui sharing pengalaman antar OPD menciptakan *safe space* untuk saling belajar. Praktik baik dalam evaluasi dan tindak lanjut mencakup penggunaan *multiple methods* (kuesioner terstruktur dan *feedback* terbuka) serta penyediaan pendampingan konsultasi melalui WhatsApp group yang mencatat 10 pertanyaan dalam dua minggu pertama pasca-kegiatan, menunjukkan responsivitas tinggi terhadap kebutuhan peserta. Dokumentasi komprehensif tentang praktik-praktik baik ini, termasuk panduan implementasi dan *lessons learned*, menjadi *legacy* penting yang dapat terus memberikan manfaat jauh melampaui durasi kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa diseminasi hasil penelitian tentang partisipasi anggaran sebagai kunci kinerja manajerial telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik di KPPN Merauke pada tanggal 15 Desember 2024 dengan melibatkan 25 pejabat struktural dari KPPN di Kabupaten Merauke dan stakeholder terkait. Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian yang melampaui target, dengan rata-rata skor kepuasan mencapai 4,33 dari skala 5 (melampaui target 4,0) dan 84,7% peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip partisipasi anggaran di OPD masing-masing (melampaui target 70%). Kegiatan ini berhasil memvalidasi pentingnya *research-to-practice translation* dalam pengelolaan keuangan publik, dimana temuan empiris yang menunjukkan pengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial ($\beta = 0,462$; $R^2 = 66,2\%$) berhasil diterjemahkan menjadi pemahaman praktis yang aplikabel. Pendekatan *Community-Based Education* yang dikombinasikan dengan *Research Dissemination and Knowledge Transfer* terbukti efektif dalam memfasilitasi pembelajaran yang *participatory, problem-centered, dan immediately applicable* bagi para pejabat struktural.

Kegiatan ini diharapkan menjadi katalis untuk transformasi fundamental sistem penganggaran di Papua Selatan dari model *top-down* menjadi partisipatif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap reduksi ketimpangan wilayah melalui peningkatan kinerja manajerial dan efektivitas program pembangunan. Untuk memastikan sustainability dan dampak jangka panjang, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan: (1) program peningkatan kapasitas bertahap mencakup pelatihan teknis penyusunan anggaran partisipatif; (2) pembentukan forum koordinasi antar OPD untuk berbagi *best practices*; (3) dukungan regulasi dari pimpinan daerah untuk melembagakan partisipasi anggaran; (4) monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi di OPD; dan (5) pendampingan konsultasi berkelanjutan untuk dukungan teknis. Dengan komitmen implementasi yang tinggi dari para pejabat struktural dan dukungan institusional yang kuat, Papua Selatan berpeluang besar untuk menjadi contoh *best practice participatory budgeting* dalam konteks pengelolaan dana Otonomi Khusus di Indonesia, yang berkontribusi terhadap reduksi ketimpangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Musamus yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, baik dari segi pendanaan, fasilitas, maupun dukungan administratif. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan, fasilitas venue, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Alhasnawi, M. Y., Mohd Said, R., Mat Daud, Z., & Muhammad, H. (2023). Enhancing managerial performance through budget participation: Insights from a two-stage A PLS-SEM and artificial neural network approach (ANN). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100161>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. (2025). *Kabupaten Merauke dalam Angka 2025*.
- Cabannes, Y. (2019). The contribution of participatory budgeting to the achievement of the Sustainable Development Goals: lessons for policy in Commonwealth countries. *Commonwealth Journal of Local Governance*. <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i21.6707>
- Hammouch, H., Manta, O., & Palazzo, M. (2024). Adapting Management Control Systems to Organizational Contingency Factors: A Study of Moroccan Industrial Companies. *Businesses*, 4(4), 883–898. <https://doi.org/10.3390/businesses4040048>
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Irianto, O., Mattulada, A., Muliati, & Jamaluddin. (2025). Organizational Commitment as A Mediator in Managerial Performance of Regional Apparatus in Papua. *Lex Localis*, 23(S5), 1996–2007.
- Irianto, O., Syahrul, R. S., & Aziz, R. A. (2025). Transformasi Ekonomi Kreatif di Era Digital: Strategi dan Implementasi Pengembangan Unit Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 3(3), 231–242. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v3i3.533>
- Medvidović, N. V., Orlić, G. M., Buljac, M., Vrsalović, L., Smoljko, I., Marušić, M., Vuletić, L., Rosandić, T. K., Nazlić, M., Radman, M., & Carev, I. (2024). Service-learning. *Kemija u Industriji*, 73(3–4), 153–165. <https://doi.org/10.15255/KUI.2023.049>
- Metropapua. (2025, May 8). Ini Dana Otonomi Khusus se-Papua Tahun Anggaran 2025. *Metro Papua.Com*.
- Ndruru, S., Lase, D., Waruwu, E., & Waruwu, R. M. P. (2025). Peran Kepemimpinan dalam Mengelola Resistensi Terhadap Perubahan Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(1), 11–21. <https://doi.org/10.62138/management.v2i1.114>
- Pawening, Y. S., & Setiadi, W. (2024). Penerapan Asas Demokrasi Terkait Pemekaran Provinsi Di Wilayah Papua. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 198–209. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.295>
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2024). Eksplorasi Prinsip Andragogi dalam Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Studi Kualitatif pada Pendidikan Formal dan Non-Formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152. <https://doi.org/10.53624/ptk.v5i1.505>
- Zonatto, V. C. da S., Nascimento, J. C., Lunardi, M. A., & Degenhart, L. (2020). Effects of Budgetary Participation on Managerial Attitudes, Satisfaction, and Managerial Performance. *Revista de Administracao Contemporanea*, 24(6), 532–549. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020200047>